



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
UNIT KERJA : RS KHUSUS BERSALIN SAYANG IBU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RETNO SULISTYO SITORESMI
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 153292

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.584.300.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 278 m2/119 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 68 m2/84 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/21 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
4. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 21.89 m2/21.89 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 261.900.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 21.89 m2/21.89 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 267.400.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 165.000.000

1. MOBIL, SUZUKI BALENO SEDAN Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
2. MOBIL, TOYOTA NEW CAMRY SEDAN Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 475.500.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. 204.500.000**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.501.050.227**F. HARTA LAINNYA** Rp. 951.939.000

Sub Total Rp. 4.882.289.227



III. HUTANG

Rp.

566.306.495

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

4.315.982.732

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.